



Pemkot Larang Beri Uang Pengemis

JOGJA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai gerah dengan cap "surga pengemis" yang dialamatkan kepada Jogja. Pemkot melarang masyarakat memberi uang kepada pengemis dan anak jalanan yang mangkal di berbagai sudut kota.

Larangan itu akan ditegaskan dengan pemasangan papan imbauan bagi masyarakat untuk tidak memberi uang kepada pengemis dan anak jalanan. Pada tahap pertama, papan akan dipasang di 6 lokasi. Yaitu simpang Gondomanan, Pingit, Wirobrajan, Mujamuju, dan Pojok Beteng Kulon, serta Taman Parkir Abubakar Ali.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Siwi Subektyastuti di Balai kota Timoho, Senin (27/4), mengatakan, pemasangan papan peringatan itu merupakan salahsatu upaya menangani persoalan pengemis

dan anak jalanan melalui basis masyarakat.

Papan peringatan berbunyi "Peduli tidak sama dengan memberi uang. Salurkan uang receh Anda pada organisasi sosial keagamaan". Papan berukuran 125 x 90 cm, sehingga diharapkan bisa dibaca dengan jelas oleh para pengguna jalan.

"Kita ingin menyadarkan masyarakat bahwa pemberian uang pada anjal merupakan tindakan yang justru tidak mendidik. Pemasangan papan peringatan pemberian uang pada anjal dan pengemis juga diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada para pengemis untuk tidak lagi beroperasi," tegasnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi DIY, jumlah anak jalanan yang resmi tercatat pada 2007 sebanyak 181 orang. Menurutnya, anak jalanan dan pengemis sngat mobile, sehingga datanya sangat dinamis. Jumlah anak jalanan dan pengemis selalu

berbeda-beda dari minggu ke minggu. Dengan demikian, sangat terbuka kemungkinan adanya penambahan jumlah.

Dia memperkirakan pemasangan papan peringatan cukup efektif untuk menekan jumlah pengemis dan anak jalanan di Jogja. Namun, dengan catatan, gerakan tersebut mesti memperoleh tanggapan positif dari masyarakat sendiri. Pemkot menyediakan dana Rp 95 juta untuk penanganan anak jalanan melalui Forum Koordinasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM).

Terpisah, Walikota Yogyakarta, H Herry Zudianto, menandakan, persoalan anak jalanan tidak akan selesai jika penanganannya diserahkan kepada Pemkot saja. Pemerintah daerah lain mestinya juga ikut bertanggung jawab terhadap kehadiran pengemis dan anak jalanan di Jogja, karena 80 persen dari mereka merupakan penduduk luar Jogja. (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005